

**LAPORAN TRANSPARANSI
PELAKSANAAN TATA
KELOLA PT. BPR SURYA
YUDHA TAHUN 2025**



Jl. Raya Kertek-Wonosobo Km.1
TELEPON: (0286) 3329686

1. Penjelasan Umum Penerapan Tata Kelola

| Informasi Umum BPR | |
|--------------------|---------------------------|
| Nama BPR/BPRS | PT BPR Surya Yudha |
| Alamat | Jln. Raya Kertek Wonosobo |
| Nomor Telepon | (0286) 33329686 |

Penjelasan Umum:

PT BPR Surya Yudha memiliki komitmen yang kuat untuk melaksanakan Tata Kelola sesuai standar Tata Kelola yang telah diatur oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) sehingga PT.BPR Surya Yudha dapat terus tumbuh secara berkelanjutan dan memiliki daya saing di industri perbankan. Penerapan Tata Kelola yang Baik pada PT BPR Surya Yudha didukung oleh integritas yang tinggi melalui proses intern yang melibatkan seluruh organ bank baik dari seluruh tingkatan organisasi terutama bagi Direksi dan Dewan Komisaris yang memiliki peranan sentral serta signifikan dalam penerapan Penerapan Tata Kelola Perusahaan di lingkungan PT. BPR Surya Yudha.

PT. BPR Surya Yudha telah beroperasi lebih dari 28 tahun dan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usahanya. Prinsip-prinsip Tata Kelola yang dimaksud adalah Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi dan Kesetaraan. Hal ini didorong oleh komitmen Bank untuk mencapai Visi yaitu "Menjadi BPR Regional Jawa Tengah dan Terkemuka Indonesia".

Dalam penerapan Tata Kelola, PT. BPR Surya Yudha selalu mengacu pada 3 (tiga) aspek Tata Kelola yaitu Struktur & Infrastruktur, Proses dan Hasil Tata Kelola. Ketiga aspek Tata Kelola tersebut menjadi intisari sekaligus fokus Bank dalam mewujudkan Tata Kelola yang bertujuan untuk melindungi kepentingan Pemangku Kepentingan.

Di sepanjang 2025 dan untuk di tahun mendatang, PT. BPR Surya Yudha terus berupaya untuk mewujudkan hal- hal tersebut melalui penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (GCG) secara konsisten dan berkelanjutan.

| Ringkasan Hasil Penilaian Sendiri atas Penerapan Tata Kelola | |
|--|---------------|
| Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment) Tata Kelola | 3. Cukup Baik |

Penjelasan Peringkat Komposit Hasil Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Tata Kelola:

Manajemen PT BPR Surya Yudha telah melakukan pelaksanaan tata kelola yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas prinsip tata kelola. Dalam hal terdapat kelemahan pelaksanaan prinsip tata kelola, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari manajemen BPR.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi

| | | |
|--|---------|---|
| A. | Nama | Saptono Setyartoyo |
| | Jabatan | Direktur Utama |
| <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Utama adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bertanggung jawab untuk melakukan pengelolaan Bank secara profesional dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian Bank, Anggaran Dasar Perusahaan serta ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. 2. Merealisasikan pencapaian target Kinerja Keuangan Bank sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Bisnis Bank. 3. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (<i>Good Corporate Governance</i>) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya. 4. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya. 5. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 6. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis dibidang kepegawaian kepada pegawai. 7. Menandatangani surat keputusan dan/ atau surat edaran dan ketentuan lain yang akan menjadi pedoman pelaksanaan operasional bank. 8. Menyetujui dan mengesahkan pengeluaran biaya dan kewenangan kredit sesuai dengan kewenangan yang berlaku. | | |
| B. | Nama | Atik Handayani |
| | Jabatan | Direktur Umum Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan |
| <p>Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:</p> <p>Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Umum dan YMF Kepatuhan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menandatangani surat keputusan dan/ atau surat edaran dan ketentuan lain yang akan dijadikan pedoman pelaksanaan operasional kantor; 2. Harus memastikan bahwa kepatuhan bank telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 3. Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya budaya kepatuhan bank; 4. Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi; 5. Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal bank; 6. Memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan; 7. Meminimalisir risiko kepatuhan bank; 8. Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/ atau keputusan yang diambil Direksi tidak menyimpang dari ketentuan OJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; | | |

9. Memastikan terlaksananya sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan OJK terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
10. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai bank;
11. Melaporkan kepada anggota Direksi lainnya dan Dewan Komisaris secara tertulis terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh Direktur BPR;
12. Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan fungsi kepatuhan;
13. Melakukan diagnosis dan analisis mengenai organisasi, kebijakan, prosedur, limit, dan pedoman serta pengembangan sistem yang terkait dengan penerapan Manajemen Risiko;
14. Menyusun rencana penyempurnaan sesuai dengan acuan dalam standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR dalam hal masih terdapat ketidaksesuaian antara pedoman intern BPR dengan standar penerapan Manajemen Risiko bagi BPR;
15. Melakukan sosialisasi pedoman penerapan Manajemen Risiko kepada pegawai agar memahami praktik Manajemen Risiko dan mengembangkan budaya Risiko (*risk culture*) kepada seluruh pegawai pada setiap tingkatan organisasi BPR; dan
16. Melakukan hak dan kewajiban Direktur sebagaimana ketentuan yang berlaku.

| | |
|---------|-------------------------|
| C. Nama | Handi Ria Purnama Putra |
| Jabatan | Direktur Bisnis |

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Bisnis adalah sebagai berikut:

1. Mengembangkan, melaksanakan dan mengawasi jalannya operasional perusahaan terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana;
2. Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, harus diyakinkan sesuai dengan sistem dan prosedur kerja, tugas, wewenang dan kebijakan perusahaan;
3. Mengkoordinir dan mengawasi rencana kerja secara efektif dan efisien untuk seluruh wilayah, cabang dan bagian;
4. Melaksanakan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dengan memperhatikan aspek kecukupan SDM dan kompetensinya.
5. Menciptakan dan menjaga kelancaran komunikasi, kerjasama antar bagian untuk mencapai hasil kerja secara maksimal;
6. Merencanakan, mengatur dan mengawasi pelaksanaan peningkatan kemampuan dan kualifikasi sumber daya manusia demi mencapai produktifitas yang maksimal;
7. Mempromosikan dan mengembangkan operasional/ transaksi usaha perbankan demi untuk meningkatkan dan mengembangkan perusahaan secara keseluruhan eksposur risiko yang diambil alih BPR secara keseluruhan;
8. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan tata kelola, manajemen risiko dan eksposur risiko yang diambil alih BPR secara keseluruhan;
9. Mengkoordinasikan dan mengawasi jalannya operasional kredit secara menyeluruh serta mengembangkan dan meningkatkan kerjasama dalam hal informasi dan komunikasi kredit antar wilayah dan cabang dengan baik untuk mencapai hasil kerja yang maksimal, efektif dan efisien;
10. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Audit Intern BPR, Auditor Ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau Otoritas lainnya.
11. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tindak Lanjut Rekomendasi Dewan Komisaris:

- a. Penerapan Tata Kelola telah dilaksanakan secara konsisten dan menerapkan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Tingkat Kesehatan Bank telah dipertahankan dalam posisi cukup sehat.
- c. Direksi telah melaksanakan pengelolaan sumber daya manusia sesuai rekomendasi Dewan Komisaris yaitu: Melakukan evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan *coaching*, mentoring dan pembinaan agar lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan. Pemberian sanksi telah dilaksanakan kepada pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku. Apresiasi juga telah diserahkan bagi pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Surya Yudha.
- d. Telah memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan mendekati 30 hari dan melaksanakan tindak lanjut sesuai dengan permasalahan debitur kasus per kasus.
- e. Temuan pemeriksaan OJK telah tuntas ditindaklanjuti.
- f. Semua temuan Audit Intern telah ditindaklanjuti dan telah diberikan sosialisasi kepada seluruh pegawai terkait pelaksanaan *internal control* dalam melaksanakan tugas masing- masing.
- g. Fokus menurunkan NPL dengan menetapkan langkah-langkah penyelesaian kredit.
- h. Melaksanakan penerapan APU PPT & PPPSPM secara konsisten.
- i. Mengoptimalkan penghimpunan dana murah.
- j. Melakukan penyelesaian pelampauan BMPK dengan melakukan penyelesaian kredit melalui penjualan agunan.
- j. Mengoptimalkan pendapatan dengan peningkatan kredit, penyelesaian kredit bermasalah dan *Fee Based Income*.

3. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Komisaris

| | | |
|----|---------|-----------------|
| A. | Nama | Emila Hayati |
| | Jabatan | Komisaris Utama |

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris Utama adalah sebagai berikut:

- 1. Sebagai pusat komunikasi antara Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham;
- 2. Memastikan bahwa Dewan Komisaris senantiasa diberi informasi mengenai hal- hal yang relevan dan dimintakan persetujuan yang diperlukan;
- 3. Bertanggung jawab memimpin Dewan Komisaris guna menjamin efektivitas fungsi Dewan Komisaris;
- 4. Mengundang anggota Dewan Komisaris untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris dan bertanggung jawab menentukan agenda rapat dan memimpin rapat;
- 5. menentukan keadaan mendesak dalam hal undangan rapat anggota Dewan Komisaris dilakukan dalam waktu kurang dari 3 hari;
- 6. Memastikan setiap anggota Dewan Komisaris mendapatkan informasi yang akurat, tepat waktu dan jelas;
- 7. Membina hubungan konstruktif antara Dewan Komisaris dan Direksi;
- 8. Mengembangkan standar *Corporate Governance* yang baik;
- 9. Mengesahkan dan mengawasi pelaksanaan Rencana Bisnis bank (RBB);
- 10. Bertanggung jawab dan mengkoordinir seluruh tugas-tugas yang dilakukan oleh Dewan Komisaris;
- 11. Menerima laporan-laporan dari komite di bawah Dewan Komisaris.

| | | |
|----|---------|----------------------|
| B. | Nama | Margono |
| | Jabatan | Komisaris Independen |

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab & wewenangnya secara independen.
2. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BSY sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengarahkan, memantau & mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BSY.
4. Memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha BSY serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola BSY.
5. Melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada Direksi.
6. Menjaga kepentingan BSY dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
7. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut.
8. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank yang diusulkan Direksi dan mengesahkannya sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar dan POJK tentang RBB BPR.
9. Memonitor perkembangan kegiatan usaha BSY.
10. Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.
11. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari SKAI, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/ atau otoritas lainnya.
12. Memastikan bahwa Direksi telah menyampaikan laporan-laporan eksternal.
13. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BSY.
14. Memastikan bahwa komite Audit mampu menjalankan tugasnya secara efektif.
15. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan penerapan APU PPT dan PPPSPM.
16. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik.
17. Melaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri.
18. Melakukan *review* & memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan BSY.

| | | |
|----|---------|---------------------|
| 3. | Nama | Agus Budi Santoso |
| | Jabatan | Komsaris Independen |

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab:

Tugas dan Tanggung Jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya secara independen.
2. Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya untuk kepentingan dan usaha BSY sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BSY.
4. Memastikan terselenggaranya GCG dalam setiap kegiatan usaha BSY serta melakukan evaluasi terhadap kebijakan tata kelola BSY.
5. Melakukan pengawasan dan memberik nasehat kepada Direksi.
6. Menjaga kepentingan BSY dengan memperhatikan kepentingan para pemegang saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
7. Meneliti dan menelaah Laporan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani Laporan Tahunan tersebut.
8. Memberikan pendapat dan saran atas Rencana Bisnis Bank yang diusulkan Direksi dan



- mengesahkannya sesuai dengan ketentuan pada anggaran dasar dan POJK tentang RBB BPR.
9. Memonitor perkembangan kegiatan usaha BSY.
 10. Memberikan pendapat dan saran kepada pemegang saham mengenai masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan perusahaan.
 11. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan dan rekomendasi dari Satuan kerja Audit Internal, auditor eksternal, hasil pengawasan Dewan Komisaris, OJK dan/ atau otoritas lainnya.
 12. Memastikan bahwa Direksi telah menyampaikan laporan-laporan eksternal.
 13. Memberitahukan kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditemukannya pelanggaran peraturan perundang-undangan dibidang keuangan dan perbankan dan/ atau keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BSY.
 14. Memastikan bahwa komite Pemantau Risiko mampu menjalankan tugasnya secara efektif.
 15. Mengusulkan kepada RUPS penunjukan akuntan publik.
 16. Melaporkan dalam rapat Dewan Komisaris tentang tindakan- tindakan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris baik secara bersama- sama maupun sendiri-sendiri.
 17. Melakukan review dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang diterapkan BSY.

Rekomendasi Kepada Direksi:

- a. Melaksanakan penerapan Tata Kelola secara konsisten dan penerapan Manajemen Risiko yang efektif dalam setiap kegiatan operasional dan bisnis.
- b. Melakukan perbaikan Tingkat Kesehatan Bank dalam posisi sehat.
- c. Secara rutin melakukan untuk pengelolaan sumber daya manusia yaitu: Evaluasi kinerja (minimal periode per semester) terhadap seluruh pegawai, memberikan *coaching*, mentoring dan pembinaan serta lebih disiplin dalam menerapkan Peraturan Perusahaan, mampu bertindak tegas dalam pemberian sanksi bagi pegawai yang melanggar ketentuan/ peraturan yang berlaku dan memberikan *reward* / apresiasi kepada pegawai yang memberikan kontribusi positif bagi PT BPR Surya Yudha.
- d. Memonitor secara ketat debitur yang mengalami tunggakan < 30 hari agar dapat mendeteksi secara dini setiap potensi kegagalan bayar dan dapat mengantisipasinya secara cepat sehingga kredit tidak jatuh pada kolektibilitas 2.
- e. Semua komitmen perbaikan atas temuan pemeriksaan OJK agar segera ditindaklanjuti dan sudah tuntas pada paling lambat bulan Desember 2025.
- f. Menindaklanjuti semua temuan Audit Internal dan segera mengambil langkah- langkah perbaikan kontrol agar tidak terjadi kembali temuan berulang apalagi yang bersifat signifikan.
- g. Fokus menurunkan NPL dengan menetapkan langkah-langkah penyelesaian kredit.
- h. Melaksanakan penerapan APU PPT & PPPSPM secara konsisten.
- i. Mengoptimalkan penghimpunan dana murah.
- j. Mengoptimalkan pendapatan dengan peningkatan kredit, penyelesaian kredit bermasalah dan *Fee Based Income*.

4. Tugas, Tanggung Jawab, Program Kerja, dan Realisasi Program Kerja Komite

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| A. | Komite | 01. Komite Audit |
| | Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab | <ol style="list-style-type: none"> (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit. (2) Dalam rangka melaksanakan tugas untuk memberikan pendapat rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit paling sedikit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: <ol style="list-style-type: none"> (a) Pelaksanaan tugas Satuan Kerja Audit Intern. (b) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh kantor akuntan publik dengan standar audit, (c) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku bagi BPR; (d) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan satuan kerja audit intern, akuntan publik dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/ atau otoritas lain. (3) Komite Audit wajib memberikan rekomendasi mengenai penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS, di mana RUPS dapat mendelegasikan Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar tersebut kepada Dewan Komisaris. (4) Melakukan penelaahan atas kepatuhan BPR terhadap peraturan perundang-undangan dibidang perbankan, perundang-undangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BPR. (5) Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan BPR. (6) Menyusun dan/ atau memperbaiki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. (7) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya potensi benturan kepentingan bank. (8) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi bank. (9) Melakukan penelaahan atas berfungsinya kontrol internal. (10) Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris. (11) Menyusun program kerja tahunan pada bulan Januari. (12) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penyusunan rencana audit, ruang lingkup dan anggaran SKAI. |
| | Jumlah Rapat | 4 |

Program Kerja Komite:

1. Rapat evaluasi hasil kerja triwulan IV tahun 2024.
2. Rapat dengan Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) membahas rencana kerja SKAI tahun 2025 dan evaluasi tindak lanjut hasil audit.
3. Rapat evaluasi kesesuaian laporan keuangan dengan standar SAK EP.
4. Rapat dengan Satuan Kerja Kepatuhan dan APU PPT PPPSPM membahas evaluasi pelaksanaan APU PPT dan PPPSPM.
5. Rapat evaluasi hasil kerja triwulanan.
6. Rapat evaluasi tindak lanjut LHP SKAI oleh Direksi.
7. Rapat bersama Satuan Kerja Audit Internal (SKAI) membahas LHP SKAI atas pemeriksaan cabang.
8. Rapat komite audit dalam rangka evaluasi kinerja KAP periode 2025 dan penunjukkan KAP periode 2026.
9. Rapat komite audit dalam rangka membuat rencana kerja tahun 2026.

Realisasi Program Kerja Komite:

1. Rapat pembahasan evaluasi hasil kerja komite audit periode triwulan IV tahun 2024 dan rencana kerja komite audit tahun 2025 pada bulan Januari 2025.
2. Melakukan evaluasi atas pemberian kredit.
3. Rapat bersama dengan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) pembahasan atas hasil pemeriksaan SKAI di kantor Cabang Utama, dilaksanakan pada bulan April 2025.
4. Rapat bersama dengan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) pembahasan atas hasil pemeriksaan SKAI di kantor cabang Wonosobo, dilaksanakan pada bulan Mei 2025.
5. Melakukan evaluasi terhadap penyelesaian kredit non lancar.
6. Rapat bersama dengan Satuan Kerja Internal Audit (SKAI) pembahasan atas hasil pemeriksaan SKAI di kantor cabang parakan, dilaksanakan pada bulan Agustus 2025.
7. Melakukan analisa dan memberikan rekomendasi atas penyelesaian kredit macet.

B. Komite

Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab

02. Komite Pemantau Risiko

- (1) Komite Pemantau Risiko memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik.
- (2) Dalam rangka memberikan rekomendasi Komite Pemantau Risiko paling sedikit melakukan:
 - (a) Evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut;
 - (b) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko;
- (3) Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas berbagai risiko yang dihadapi bank dan penerapan Manajemen Risiko oleh Direksi.
- (4) Menyusun dan/ atau memperbarui Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko.
- (5) Melakukan penelaahan dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait adanya eksposur risiko pada bank.
- (6) Menjaga kerahasiaan seluruh dokumen, data dan informasi bank.

| | |
|--------------|--|
| | (7) Menjalankan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris terkait fungsi pengawasan penerapan Manajemen Risiko. |
| | (8) Komite Pemantau Risiko wajib menyusun program kerja tahunan setiap bulan Januari. |
| Jumlah Rapat | 12 |

Program Kerja Komite:

1. Rapat evaluasi hasil kerja triwulan IV 2024.
2. Rapat dengan SKMR untuk membahas rencana kerja tahun 2025 dan evaluasi kerja SKMR tahun 2024.
3. Rapat evaluasi laporan tahunan.
4. Laporan hasil kunjungan.
5. Rapat evaluasi triwulanan tahun 2025.
6. Rapat evaluasi pelaksanaan manajemen risiko.
7. Rapat evaluasi pedoman dan tata tertib komite serta membuat laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Komite Pemantau Risiko.

Realisasi Program Kerja Komite:

1. Rapat pembahasan rencana kerja komite pemantau risiko tahun 2025 dan evaluasi hasil kerja triwulan IV komite pemantau risiko tahun 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 9 Januari 2025.
2. Rapat bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko pembahasan mengenai evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan risiko yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2025.
3. Rapat bersama dengan Dewan Komisaris pada bulan Maret 2025 membahas hasil kerja komite dan menyampaikan usulan kepada Dewan Komisaris berdasarkan hasil evaluasi komite pemantau risiko atas kegiatan operasional bank.
4. Rapat evaluasi kerja komite pemantau risiko periode triwulan I tahun 2025 pada bulan April 2025.
5. Rapat bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko evaluasi pelaksanaan manajemen risiko pada bulan Mei 2025.
6. Rapat evaluasi proses penyelesaian kredit melalui proses litigasi melalui pengadilan negeri yang dilaksanakan pada bulan Juni 2025.
7. Rapat evaluasi hasil kerja komite pemantau risiko triwulan II tahun 2025 dilaksanakan pada tanggal 18 Juli 2025.
8. Rapat bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko evaluasi kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko pada bulan Agustus 2025.
9. Rapat bersama dengan Dewan Komisaris mengenai hasil kerja Komite Pemantau Risiko dan penyampaian usulan kepada Dewan Komisaris atas hasil evaluasi Komite Pemantau Risiko atas kegiatan operasional bank, dilaksanakan pada bulan September 2025.
10. Rapat evaluasi hasil kerja triwulan III tahun 2025 pada bulan Oktober 2025.
11. Rapat bersama dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko evaluasi terhadap pelaksanaan manajemen risiko, dilaksanakan pada bulan November 2025.
12. Rapat evaluasi terhadap pedoman dan tata tertib komite Pemantau Risiko, dilaksanakan bulan Desember 2025.

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| C. | Komite | 03. Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Penjelasan Tugas dan Tanggung Jawab | 1. Kebijakan remunerasi : <ul style="list-style-type: none"> a. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan remunerasi yang didasarkan atas kinerja keuangan dan pemenuhan cadangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, pencapaian kinerja, kewajaran dengan peer group dan pertimbangan sasaran dan strategi jangka Panjang; dan b. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi. 2. Kebijakan nominasi: <ul style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/ atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris; b. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris; c. Mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak Independen yang akan menjadi anggota komite audit dan komite pemantau risiko. 3. Mengungkapkan dalam usulan rekomendasi apabila anggota komite remunerasi dan nominasi memiliki benturan kepentingan dengan usulan pengangkatan dan/ atau penggantian yang direkomendasikan |
| | Jumlah Rapat | 7 |

Program Kerja Komite:

1. Rapat komite menyusun rencana kerja tahun 2025.
2. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja komite remunerasi dan nominasi.
3. Rapat komite pembahasan identifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko. Jatuh tempo jabatan Direktur Utama pada tanggal 27 April 2025 dan komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
4. Rapat pembahasan kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi.
5. Rapat membahas kebijakan gaji berdasarkan COLA dan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Rapat pembahasan untuk mengidentifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pemantau risiko. Jatuh tempo kontrak Bp Hantoro selaku anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 26 Agustus 2025.



7. Rapat Komite membahas terkait dengan jatuh tempo Peraturan Perusahaan yang akan jatuh tempo pada tanggal 25 Oktober 2025
8. Rapat penyusunan rencana kerja tahun 2026.

Realisasi Program Kerja Komite:

1. Menyusun rencana kerja Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2025.
2. Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite Remunerasi dan Nominasi
3. Rapat pembahasan untuk melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Direksi dan komposisi jabatan anggota Direksi dan Dewan komisaris pada tanggal 13 Maret 2025 dengan keputusan mengangkat kembali Bp. Saptono Satyartoyo menjadi Direktur Utama. Komposisi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tidak mengalami perubahan.
4. Rapat evaluasi kerja semester 1 tahun 2025 pada tanggal 4 Juli 2025.
5. Rapat pembahasan untuk melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 4 Juli 2025 dengan keputusan mengangkat kembali Bp. Hantoro sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
6. Pada tanggal 26 Agustus 2025 telah dilakukan rapat pembahasan mengenai Peraturan Perusahaan yang berakhir masa berlakunya pada tanggal 25 Oktober 2025, saat ini Peraturan Perusahaan telah dikinikan dan berlaku sampai dengan 30 Oktober 2027.
7. Rapat pembahasan untuk melakukan identifikasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai pihak independen yang akan menjadi anggota Komite Pemantau Risiko pada tanggal 14 November 2025 dengan keputusan mengangkat kembali Bp. Guspul sebagai anggota Komite Audit dan Ibu Aeni sebagai anggota Komite Pemantau Risiko.
8. Rapat penyusunan Rencana Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi tahun 2026 pada tanggal 19 Desember 2025.

Tindak Lanjut Rekomendasi Program Kerja dan Realisasi Program Kerja Komite:

- (1) Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta menindaklanjuti hasil temuan SKAI.
- (2) Memastikan kepatuhan BPR terhadap ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Mengevaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut.
- (4) Melaporkan kepada Dewan Komisaris atas berbagai risiko yang dihadapi bank.
- (5) Menyusun pedoman dan tata tertib kerja Komite.
- (6) Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

5. Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

Daftar Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite

| | | |
|----|--------------------------------------|---|
| A. | Nama Anggota Komite | Margono |
| | Keahlian | Ekonomi Perbankan |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 01. Ketua Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko |



| | | |
|----|--|---|
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 01. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 1. Ya |
| B. | Nama Anggota Komite | Ahmad Guspul |
| | Keahlian | Auditor Perbankan |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 02. Anggota Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 1. Ya |
| C. | Nama Anggota Komite | Agus Budi Santoso |
| | Keahlian | Ekonomi Perbankan |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 01. Ketua Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 1. Ya |
| D. | Nama Anggota Komite | Hantoro Hilarius Luturmele |
| | Keahlian | Hukum/ Legal |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau | 02. Anggota Komite Pemantau Risiko |

| | | |
|----|--|---|
| | Risiko | |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 1. Ya |
| E. | Nama Anggota Komite | Ghonimah Zumrotun Ainiyah |
| | Keahlian | Ekonomi Perbankan |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 02. Anggota Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 1. Ya |
| F. | Nama Anggota Komite | Margono |
| | Keahlian | Ekonomi Perbankan |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 01. Ketua Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 01. Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 1. Ya |
| G. | Nama Anggota Komite | Emila Hayati |
| | Keahlian | Ekonomi Perbankan |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit |

| | | |
|----|--|--|
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 2. Tidak |
| F. | Nama Anggota Komite | Yuyun Dwi Astuti |
| | Keahlian | Pejabat eksekutif SDM |
| | Jabatan Dalam Komite Audit | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Audit |
| | Jabatan Dalam Komite Pemantau Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Pemantau Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Remunerasi dan Nominasi | 02. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi |
| | Jabatan Dalam Komite Manajemen Risiko | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Manajemen Risiko |
| | Jabatan Dalam Komite Lainnya | 00. Tidak Menjabat Dalam Komite Lainnya |
| | Apakah Merupakan Pihak Independen? | 2. Tidak |

Tindak Lanjut Rekomendasi Struktur, Keanggotaan, Keahlian, dan Independensi Anggota Komite:

Seluruh anggota komite Audit dan komite pemantau risiko merupakan pihak independen yang memiliki keahlian sesuai dengan bidang tugas. Masing- masing komite diketuai oleh Komisaris Independen.

6. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada BPR

| Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada BPR | | |
|--|----------------------------|-------------------------|
| 1. | Nama | Saptono Setyartoyo |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Atik Handayani |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | Handi Ria Purnama Putra |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|----------------------------|-------------------|
| 1. | Nama | Emila Hayati |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 2. | Nama | Margono |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |
| 3. | Nama | Agus Budi Santoso |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 0,00 |

Semua anggota Direksi dan Dewan Komisaris tidak memiliki saham pada BPR

7. Kepemilikan Saham Anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Kelompok Usaha BPR

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Kelompok Usaha BPR

| | | |
|----|---|--|
| 1. | Nama | Emila Hayati |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT. Surya Yudha Banjarnegara |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 5,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 5,00 |
| 2. | Nama | Emila Hayati |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT. Surya Yudha Sejahtera Banjarnegara |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 20,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 20,00 |

Kepemilikan Saham Pemegang Saham BPR/BPRS

| | | |
|----|---|---------------------------|
| 1. | Nama | Satriyo Yudiarto |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT BPR Surya YudhaKencana |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 70,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 70,00 |

| | | |
|----|---|--|
| 2. | Nama | Satriyo Yudiarto |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT BPR Eleska Artha |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 70,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 70,00 |
| 3. | Nama | Satriyo Yudiarto |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT. BPR Bhakti Daya Ekonomi |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 25,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 25,00 |
| 4. | Nama | Satriyo Yudiarto |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT. Kusuma Agung Sejahtera |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 96,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 96,00 |
| 5. | Nama | Satriyo Yudiarto |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT. Surya Yudha Banjarnegara |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 55,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 55,00 |
| 6. | Nama | Satriyo Yudiarto |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | PT. Surya Yudha Sejahtera Banjarnegara |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 75,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 75,00 |
| 7. | Nama | Satriyo Yudiarto |
| | Nama Kelompok Usaha BPR | Surya Yudha Park |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 100,00 |
| | Persentase Kepemilikan (%) Tahun Sebelumnya | 100,00 |

Anggota Direksi dan Komisaris Independen tidak memiliki saham pada kelompok usaha BPR
 Komisaris Utama dan Pemegang Saham Pengendali memiliki saham pada kelompok usaha BPR.

8. Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Direksi pada Perusahaan Lain

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris pada Perusahaan Lain

| | | |
|----|----------------------------|-----------------------------|
| 1. | Nama | Emila Hayati |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | PT Surya Yudha Banjarnegara |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 5,00 |
| 2. | Nama | Emila Hayati |
| | Nama Bank/Perusahaan Lain | PT Surya Yudha Sejahtera |
| | Persentase Kepemilikan (%) | 20,00 |

Tidak ada Direksi yang memiliki saham pada perusahaan lain Komisaris Utama memiliki saham diperusahaan lain non bank

9. Hubungan Keuangan Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keuangan Anggota Direksi pada BPR

| | | |
|----|--|--------------------|
| 1. | Nama | Saptono Setyartoyo |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |
| 2. | Nama | Atik Handayani |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

| | | |
|----|--|-------------------------|
| 3. | Nama | Handi Ria Purnama Putra |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|--|--------------------------|
| 1. | Nama | Emila Hayati |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Satriyo Yudiarto - Suami |

| | | |
|----|--|-----------|
| 2. | Nama | Margono |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

| | | |
|----|--|-------------------|
| 3. | Nama | Agus Budi Santoso |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak ada |
| | Hubungan Keuangan Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Tidak ada |

Hubungan Keuangan Pemegang Saham pada BPR

Tidak ada Direksi yang mempunyai hubungan keuangan baik sesama Direksi maupun dengan Dewan Komisaris.

Komisaris Utama memiliki hubungan keuangan dengan Satriyo Yudiarto (suami) yang merupakan Pemegang Saham Pengendali (96%)

10. Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Direksi pada BPR

Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris pada BPR

| | | |
|----|--|---|
| 1. | Nama | Emila Hayati |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak Ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Tidak Ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Satriyo Yudiarto - Suami, Agus Sudyanto - Adik Ipar |

Hubungan Keluarga Pemegang Saham pada BPR

| | | |
|----|--|------------------------------|
| 1. | Nama | Satriyo Yudiarto |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Direksi Lain di BPR | Tidak Ada |
| | Hubungan Keluarga Dengan Anggota Dewan Komisaris Lain di BPR | Emila Hayati - Istri |
| | Hubungan Keluarga Dengan Pemegang Saham Lain di BPR | Agus Sudyanto – Adik Kandung |

11. Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Komisaris

1.1. Gaji Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|-----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Gaji | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Direksi (Rp) | Rp708.000.000 |
| Jumlah Komisaris Penerima Gaji | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Gaji Komisaris (Rp) | Rp1.066.800.000 |

1.2. Tunjangan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|-----------------|
| Jumlah Direksi Penerima Tunjangan | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Direksi (Rp) | Rp1.060.358.640 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tunjangan | 3 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tunjangan Komisaris (Rp) | Rp316.554.682 |

1.3. Tantiem Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Tantiem | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Tantiem | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Tantiem Komisaris (Rp) | Rp0 |

1.4. Kompensasi berbasis saham Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|---|---------|
| Jumlah Direksi Penerima Kompensasi berbasis saham | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Direksi (Rp) | Rp0 |
| Jumlah Komisaris Penerima Kompensasi berbasis saham | 0 orang |
| Jumlah Nominal Keseluruhan Kompensasi berbasis saham Komisaris (Rp) | Rp0 |

1.5. Remunerasi lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Remunerasi lainnya 0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Remunerasi lainnya 0 orang

Jumlah Nominal Keseluruhan Remunerasi lainnya Komisaris (Rp) Rp0

2.1. Perumahan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Perumahan (Orang) 1 orang

Jumlah Nominal Perumahan Direksi (Rp) Rp12.000.000

Jumlah Komisaris Penerima Perumahan (Orang) 1 orang

Jumlah Nominal Perumahan Komisaris (Rp) Rp15.000.000

2.2. Transportasi Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

Jumlah Direksi Penerima Transportasi (Orang) 3 orang

Jumlah Nominal Transportasi Direksi (Rp) Rp0

Jumlah Komisaris Penerima Transportasi (Orang) 3 orang

Jumlah Nominal Transportasi Komisaris (Rp) Rp0

2.3. Asuransi Kesehatan Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|--------------|
| Jumlah Direksi Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 3 orang |
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Direksi (Rp) | Rp61.109.120 |
| Jumlah Komisaris Penerima Asuransi Kesehatan (Orang) | 3 orang |
| Jumlah Nominal Asuransi Kesehatan Komisaris (Rp) | Rp26.772.480 |

2.4. Fasilitas Lain-Lainnya Bagi Direksi dan Dewan Komisaris Dalam 1 (Satu) Tahun

| | |
|--|---------------|
| Jumlah Direksi Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) | 3 orang |
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain- Lainnya Direksi (Rp) | Rp135.824.799 |
| Jumlah Komisaris Penerima Fasilitas Lain-Lainnya (Orang) | 3 orang |
| Jumlah Nominal Fasilitas Lain- Lainnya Komisaris (Rp) | Rp107.047.291 |

Remunerasi telah sesuai dengan hasil RUPS.

12. Rasio Gaji Tertinggi dan Gaji Terendah

| | |
|---|-----------|
| 1. Rasio (a) gaji pegawai yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang terendah | |
| Rasio (a/b) | 10,42 : 1 |
| 2. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Direksi yang terendah | |
| Rasio (a/b) | 1,34 : 1 |
| 3. Rasio (a) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang terendah | |
| Rasio (a/b) | 1,12 : 1 |
| 4. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi | |
| Rasio (a/b) | 1,21 : 1 |
| 5. Rasio (a) gaji anggota Direksi yang tertinggi dan (b) gaji pegawai yang tertinggi | |
| Rasio (a/b) | 1,79 : 1 |

13. Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) tahun

| | | |
|----|--|-----------------|
| 1. | Tanggal Rapat | 03 Januari 2025 |
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Kerja Dewan Komisaris Tahun 2025 2. Isu Strategis 3. Evaluasi/ Penetapan Kebijakan Strategis 4. Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris Tahun 2024. | |
| 2. | Tanggal Rapat | 10 Januari 2025 |
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Monitoring Tindak Lanjut LHP OJK Tahun 2024 2. Rencana Kerja SKAI Tahun 2025 | |
| 3. | Tanggal Rapat | 10 April 2025 |
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis BPR periode April - Juni 2025 2. Isu Strategis 3. Evaluasi/ Penetapan Isu Strategis 4. Evaluasi Realisasi RBB | |
| 4. | Tanggal Rapat | 18 Juli 2025 |
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | <ol style="list-style-type: none"> 1. Rencana Bisnis BPR periode Juli s.d September 2025 2. Isu strategis; 3. Evaluasi/ Penetapan Kebijakan Strategis; 4. Evaluasi Realisasi RBB. | |
| 5. | Tanggal Rapat | 22 Juli 2025 |
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | Evaluasi kerja SKAI | |
| 6. | Tanggal Rapat | 25 Juli 2025 |
| | Jumlah Peserta | 7 orang |
| | Topik/Materi Pembahasan: | |
| | Evaluasi hasil kerja Komite | |

| | | |
|---|----------------|------------------|
| 7. | Tanggal Rapat | 06 Oktober 2025 |
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: 1. Rencana Bisnis BPR periode Oktober s.d Desember 2025. 2. Isu Strategis 3. Evaluasi/ Penetapan Isu Strategis 4. Evaluasi Realisasi RBB | | |
| 8. | Tanggal Rapat | 08 Desember 2025 |
| | Jumlah Peserta | 3 orang |
| Topik/Materi Pembahasan: Rencana Bisnis BPR Tahun 2026 | | |

Semua rapat Dewan Komisaris dihadiri oleh semua anggota Dewan Komisaris secara lengkap.

14. Kehadiran Anggota Dewan Komisaris

| Kehadiran Anggota Dewan Komisaris dalam Pelaksanaan Rapat dalam 1 (satu) Tahun | | |
|--|--------------------------------------|-------------------|
| 1. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Emila Hayati |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 8 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |
| 2. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Margono |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 8 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |
| 3. | Nama Anggota Dewan Komisaris | Agus Budi Santoso |
| | Frekuensi Kehadiran (Fisik) | 8 kali hadir |
| | Frekuensi Kehadiran (Telekonferensi) | 0 kali hadir |

Rapat Dewan Komisaris dihadiri lengkap oleh semua anggota Dewan Komisaris



15. Jumlah Penyimpangan Intern (Internal Fraud)

| 1.1. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Direksi | |
|--|---------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| 1.2. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Anggota Dewan Komisaris | |
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

1.3. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tetap

| | |
|---|---------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 1 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 3 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 1 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

1.4. Jumlah Penyimpangan Internal oleh Pegawai Tidak Tetap

| | |
|---|---------|
| Total Fraud Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Total Fraud Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah Diselesaikan Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Dalam Proses Penyelesaian Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Laporan | 0 kasus |
| Belum Diupayakan Penyelesaiannya Pada Tahun Sebelumnya | 0 kasus |
| Telah ditindaklanjuti Melalui Proses Hukum Pada Tahun Laporan | 0 kasus |

Pada periode tahun 2025 terdapat 1 kejadian penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai tetap dan telah diselesaikan pada tahun pelaporan.

16. Permasalahan Hukum yang Dihadapi

| 1.1. Permasalahan Hukum yang Telah Selesai | |
|---|----------|
| Permasalahan Hukum Perdata yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 61 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Telah Selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) | 0 kasus |
| 1.2. Permasalahan Hukum yang Dalam Proses Penyelesaian | |
| Permasalahan Hukum Perdata yang Dalam Proses Penyelesaian | 8 kasus |
| Permasalahan Hukum Pidana yang Dalam Proses Penyelesaian | 0 kasus |

17. Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

| | | |
|---|--|--------------------|
| 1. | Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Satriyo Yudiarto |
| | Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | PSP |
| | Nama Pengambil Keputusan | Saptono Setyartoyo |
| | Jabatan Pengambil Keputusan | Direktur Utama |
| | Jenis Transaksi | Pemindahbukuan |
| | Nilai Transaksi | Rp260.000.000 |
| Keterangan: Sewa gedung Kantor Cabang Ngadirejo selama 2 tahun | | |
| 2. | Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Satriyo Yudiarto |
| | Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | PSP |
| | Nama Pengambil Keputusan | Saptono Setyartoyo |
| | Jabatan Pengambil Keputusan | Direktur Utama |
| | Jenis Transaksi | Pemindahbukuan |
| | Nilai Transaksi | Rp234.000.000 |
| Keterangan: Sewa gedung Kantor Cabang Kaliwiro selama 2 tahun | | |

| | | |
|----|---|--------------------|
| 3. | Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Satriyo Yudiarto |
| | Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | PSP |
| | Nama Pengambil Keputusan | Saptono Setyartoyo |
| | Jabatan Pengambil Keputusan | Direktur Utama |
| | Jenis Transaksi | Pemindahbukuan |
| | Nilai Transaksi | Rp140.000.000 |

Keterangan:

Sewa gedung Kantor Kas Mojotengah selama 2 tahun

| | | |
|----|---|--------------------|
| 4. | Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Satriyo Yudiarto |
| | Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | PSP |
| | Nama Pengambil Keputusan | Saptono Setyartoyo |
| | Jabatan Pengambil Keputusan | Direktur Utama |
| | Jenis Transaksi | Pemindahbukuan |
| | Nilai Transaksi | Rp60.000.000 |

Keterangan:

Sewa gedung Kantor Kas Watumalang selama 2 tahun

| | | |
|----|---|--------------------|
| 5. | Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Satriyo Yudiarto |
| | Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | PSP |
| | Nama Pengambil Keputusan | Saptono Setyartoyo |
| | Jabatan Pengambil Keputusan | Direktur Utama |
| | Jenis Transaksi | Pemindahbukuan |
| | Nilai Transaksi | Rp102.000.000 |

Keterangan:

Sewa gedung Kantor Kas Pasar Kliwon Temanggung selama 2 tahun

| | | |
|----|---|--------------------|
| 6. | Nama Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Atik Handayani |
| | Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan | Direktur Umum YMKF |
| | Nama Pengambil Keputusan | Saptono Setyartoyo |
| | Jabatan Pengambil Keputusan | Direktur Utama |
| | Jenis Transaksi | Pemindahbukuan |
| | Nilai Transaksi | Rp50.000.000 |
| | Keterangan: Sewa gedung Kantor Kas Belakambang selama 2 tahun. | |

Terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang telah dilakukan penanganan dan telah didokumentasikan sesuai ketentuan yang berlaku

18. Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

| Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik | | |
|---|---------------------------------|---|
| 1. | Tanggal Pelaksanaan | 06 Juni 2025 |
| | Jenis Kegiatan (Sosial/Politik) | 01. Kegiatan Sosial |
| | Penerima Dana | Masyarakat diwilayah jaringan kantor |
| | Penjelasan Kegiatan | Pemberian hewan kurban dalam rangka peringatan Idul Adha 2025 |
| | Jumlah (Rp) | Rp142.050.000 |

Hewan kurban dibagikan kepada masyarakat di sekitar wilayah jaringan kantor PT BPR Surya Yudha

Demikian Laporan Transparansi Tata Kelola Tahun 2025 dibuat untuk menjadi aspek transparansi Tata Kelola PT BPR Surya Yudha. Demikian kami sampaikan atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wonosobo, 27 April 2026
PT. BPR Surya Yudha


Emila Hayati
Komisaris Utama


Saptono Setyartoyo
Direktur Utama

